OMBUDSMAN RI: KUALITAS PELAYANAN PUBLIK WUJUD PERNYATAAN INTEGRITAS

Jum'at, 30 Januari 2026 - Nurul Istiamuji

Jakarta-Pernyataan integritas harus diwujudkan dalam kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penyelenggara pelayanan harus lebih siap memahami tugas dan fungsinya. Demikian disampaikan oleh Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih saat memberikan penguatan dalam Pencanangan Pembentukan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Jakarta pada Rabu (28/1/2026).

Najih mengatakan bahwa salah satu Astacita yang ingin diwujudkan pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Ia berkata agar hal tersebut dijadikan tolok ukur bagaimana membangun ZI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tambah Najih lagi, ZI merupakan predikat yang diberikan kepada instansi yang merupakan gambaran implementasi nyata dari prinsip-prinsip institusional dalam Undang-Undang Dasar Alinea keempat. Dalam alinea keempat tersebut disebutkan tujuan dibentuknya pemerintahan yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan turunan tentang pelayanan publik.

"Integritas bukan sekedar janji dan kata tapi konsistensi kata dan perbuatan," tegas Najih.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyatakan bahwa dalam reformasi birokrasi perubahan dimulai dari unit terkecil. ZI merupakan dasar bagaimana melangkah dalam budaya birokrasi kita.

"Apabila tata kelola baik maka kualitas hidup masyarakat akan baik. Birokrasi yang berintegritas bukan sekedar agenda administratif," tukas Rini.

Mengakhiri, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berharap pencanangan ZI menjadi momentum strategis membangun birokrasi. Menurutnya perjalanan ZI menjadi langkah penting untuk birokrasi lebih baik dengan menerapkan pelayanan publik yang jujur dan professional untuk mewujudkan cita-cita bersama menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju. (NI)